



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WIDYA ROSITA
2. Jabatan : SEKRETARIS DEPARTEMEN TEKNIK NUKLIR DAN FISIKA
3. NHK : 898478

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.470.450.000

1. Tanah Seluas 374 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI
Rp. 65.450.000
2. Tanah Seluas 1.000 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI
Rp. 175.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m²/74 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 540.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 195 m²/137 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 390.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 198 m²/86 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 32 m²/54 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 941.800.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 123.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, KAWASAKI Z250 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000



4.	MOBIL, HONDA HRV Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.	
	365.000.000	
5.	MOBIL, HYUNDAI CRETA Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.	
	424.800.000	
C.	HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp. 397.430.000
D.	SURAT BERHARGA	Rp. ---
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp. 5.150.061.074
F.	HARTA LAINNYA	Rp. 894.015.522
	Sub Total	Rp. 10.853.756.596
III. HUTANG		Rp. ---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		Rp. 10.853.756.596

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.